

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LORI KECAMATAN
TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER**

Jumriyani, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 2, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

Pengarang : Jumriyani

NIM : 1502015101

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si

NIP 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Volume : 11	
Nomor : 2	
Tahun : 2023	
Halaman : 245 - 255	

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LORI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER

Jumriyani ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran kinerja pemerintahdesa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, serta mengidentifikasi faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus kinerja pemerintah desa sebagai kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu serta faktor penghambat. Key informan Sekertaris Desa Lori, informan lainnya adalah pegawai pemerintah desa serta masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh miles, huberman dan saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai kualitas kerja pegawai pemerintah desa dalam pembangunan masih kurang dikarenakan terdapat kendala dalam pembangunan jalan desa, sedangkan sebagai kuantitas kerja pegawai pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa masih kurang dikarenakan pembangunan jalan yang terlaksana masih kurang tepat dari rancangan, untuk ketepatan waktu kerja pegawai pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa masih kurang dikarenakan covid19. faktor penghambat dalam penelitian ini adalah terjadinya wabah covid19 yang membuat pembangunan jalan menjadi terlambat, bahan material yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa yang disebabkan kondisi jalan poros menuju desa masih belum dikatakan baik serta pembangunan harus tertunda dikarenakan pandemi yang terjadi membuat banyak pekerja yang harus diliburkan dan pengeluaran pembangunan jalan desa dialihkan ke pandemi yang membuat pembangunan jalan desa harus tertunda sampai keadaan memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan jalan desa.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam provinsi dan dalam sebuah provinsi yang terbagi lagi menjadi daerah yang

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jumriyaniali@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

lebih kecil yaitu kabupaten atau kota serta ada kecamatan dan desa. Untuk itu pemerintah Negara Republik Indonesia mengusahakan agar pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berfungsi dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat baik yang berada di kota maupun desa. Pembangunan juga merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara terutama pembangunan dalam infrastruktur dengan adanya pembangunan infrastruktur yang maju membuat perekonomian negara juga semakin baik. Serta tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai usaha yang terus dikembangkan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan tersebut.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan juga memiliki peranan yang besar dalam suatu organisasi maupun pemerintahan dan di dalam setiap organisasi maupun pemerintahan diharapkan dapat dioptimalkan sumber daya manusianya dengan sangat baik, dalam hal ini setiap organisasi maupun pemerintahan harus mampu menyediakan dan menciptakan kinerja pegawai yang terampil dalam melaksanakan pekerjaan sebagai aparatur negara.

Desa merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh sejumlah kepala keluarga yang dapat menjalankan sistem pemerintahan sendiri sesuai dengan daerah masing-masing dan untuk itu pemerintah desa mengusahakan agar pembangunan infrastruktur di desa memadai yang bisa membuat masyarakat memiliki mata pencaharian mereka serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Hal ini yang membuat pemerintah desa berusaha membuat masyarakat desa yang tinggal didesa merasa nyaman, damai dan sejahtera dimana pemerintah desa juga bekerja sama dengan ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat.

Dalam pemerintahan kita juga harus menilai kinerja pemerintah karena para pegawailah yang harus berperan aktif dalam setiap kegiatan karena pegawai hanya menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan pemerintahan tanpa adanya peran pegawai akan memperlambat terwujudnya tujuan karena dengan adanya alat yang canggih tanpa adanya penggerak tentunya akan tidak dapat digunakan. Kinerja pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakatnya baik itu yang berada di kota-kota besar maupun desa-desa terpencil. Pembangunan yang baik dan benar membuat masyarakat akan sangat terbantu dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari, seperti pembangunan fisik seperti jalan.

Pembangunan infrastruktur setiap daerah maupun kota sangat berbeda-beda terutama untuk daerah yang sangat susah untuk diutamakan dalam memajukan pembangunan desa didaerah yang masih kurang terjangkau dari pemerintah pusat. Setiap pembangunan yang di lakukan disuatu desa harus lah sesuai dengan rancangan pembangunan yang telah mereka jalan kan apalagi untuk pembanguan

desa yang diharapkan oleh masyarakat agar bisa menjalankan usaha dengan lancar dan kehidupan yang lebih baik dengan pembangunan yang makin memadai seperti halnya yaitu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh warga desa untuk itu pemerintah daerah maupun desa sangat mementingkan pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Infrastruktur yang ada di desa maupun di kota sangat berbeda seperti pembangunan sekolah maupun jalan, di desa ada yang masih tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya sampai pembangunan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) berbeda dengan di kota banyak sekolah-sekolah yang dapat dipilih oleh masyarakat, dan jalan desa banyak yang masih harus lebih diperhatikan lagi. Dalam pembangunan infrastruktur jalan desa masih banyak yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di karenakan banyaknya jalan desa yang masih kurang bagus atau banyak yang rusak, baik itu rusak sedang maupun rusak parah yang bisa menghambat aktivitas atau kegiatan sehari-hari masyarakat desa.

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan penulis dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam pembangunan fisik masih kurang, seperti jalan desa yang masih banyaknya jalan desa yang masih kurang bagus atau banyak yang rusak, baik itu rusak sedang maupun rusak parah yang bisa menghambat aktivitas atau kegiatan sehari-hari masyarakat desa.

Melihat dari permasalahan yang terjadi, terdapat rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Kedua, peneliti ingin mengetahui apa saja faktor penghambat di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Utara.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2010:10) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2013:13) adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek "manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. Tujuan

manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat tujuan menurut Masram dan Mu'ah (2017:4) adalah:

1. Tujuan Organisasional, ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi.
2. Tujuan Fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Tujuan Sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalis dampak negatif terhadap organisasi.
4. Tujuan Personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.

Manajemen sumber daya manusia suatu pegawai yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi maupun perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menerapkan suatu fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, pengadaan, penempatan, pembangunan, lingkungan kerja, dan kompensasi.

Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2011:260) kinerja adalah merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Selanjutnya Moehersono (2012:95) menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan, strategis suatu organisasi.

Didalam buku Dharma (2013:355), mengatakan pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik atau tidaknya).
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.
4. Kerjasama, yaitu kemampuan pegawai untuk kerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja atau pencapaian tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan atau organisasi yang dimana para pegawai harus mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soemantri (2010:4) menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Definisi kewenangan desa dalam Permendagri 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa pada Pasal 18 adalah kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kemudian Ridwan (2014:103) menyatakan bahwa kewenangan dan kekuasaan itu berbeda yang dimana kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dalam suatu kewenangan ada dua macam yaitu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal yang dimana kewenangan secara horizontal yaitu menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya sedangkan kewenangan secara vertikal yaitu untuk menjalankan tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Siagian dalam Anggara dan Sumantri (2016:20) pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Kemudian secara spesifik oleh Stone dalam Rosalina (2013:110) pengertian Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk pelayanan publik terutama untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai pembangunan dengan tujuan pemerintahan baik dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan- pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.

Dalam Suryawardana, dkk (2015:86) ada tiga alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya rakyat dan negara adil dan makmur.

2. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kapet, kawasan industri, pelabuhan, pasar-pasar, dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru di bidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar.
3. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
4. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia awal abad 21 ini. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Karena isolasi wilayah sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga praktis hanya dikonsumsi anggota keluarga. Akibatnya, tingkat pendapatan tetap rendah, kemudian mereka diklaim sebagai masyarakat miskin.

Definisi Konsepsional

kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan jalan desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun suatu desa agar dapat membangun desa menjadi yang lebih baik dan lebih maju dalam segi pembangunan infrastruktur desa yang telah direncanakan, sehingga dapat melihat dari hasil suatu pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan oleh pemerintah dengan baik dan benar dapat menjadikan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan sudah baik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Adapun fokus dari penelitian adalah kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja dan Ketepatan waktu serta faktor penghambat. Sumber dan jenis data penelitian menggunakan pemilihan informan melalui metode Purposive Sampling dengan key Informant Kepala dan Sekretaris Desa Lori. Informan lainnya ialah seluruh staff pegawai kantor dan masyarakat Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, serta sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan serta buku-buku referensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

Berikut penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Kualitas

Kualitas merupakan salah satu indikator dalam menilai pekerjaan seorang pegawai terhadap mutu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan standar kerja yang ditentukan baik dari aspek hukum, undang-undang, tugas pokok dan fungsi pegawai, serta peraturan yang harus diikuti oleh pegawai yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kinerja pemerintah maupun pemerintahan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memajukan desa yang di mana pembangunan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera, untuk itu dibutuhkan suatu kinerja dan kualitas yang baik dan dalam pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Kualitas menurut Dharma (2013:355) yaitu mutu yang dihasilkan. Kualitas juga merupakan hasil pekerjaan seseorang atau pegawai yang telah dihasilkan baik maupun tidak baiknya hasil pekerjaan dapat dilihat dari kualitas tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kualitas kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa masih belum baik dikarenakan pekerjaan yang telah dilakukan masih belum selesai serta dana pemerintah untuk pembangunan jalan desa digunakan untuk pandemi yang terjadi di masyarakat desa. Sehingga membuat banyak pekerja harus diliburkan dan hal ini yang membuat kinerja pemerintah dalam kualitas masih belum baik. Kualitas kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai atau organisasi dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan. Kualitas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang diberikan harus dapat diselesaikan dengan baik terutama pembangunan infrastruktur jalan desa maupun pembangunan yang lain harusnya lebih diutamakan apalagi dalam membangun desa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, kualitas sangat dibutuhkan serta dapat menjadikan penilaian pada seorang pegawai di mana letak kekurangan dalam menjalankan tugas yang diberikan.

b. Kuantitas

Tanggung jawab seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan membuat kinerja pemerintah desa akan lebih baik, serta kemampuan pegawai didalam menyelesaikan suatu tugas dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kuantitas menurut Dharma (2013:355) yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pembangunan infrastruktur dalam kinerja pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan yang telah direncanakan dan tanggung jawab yang dapat

diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk membangun desa yang lebih baik.

Kuantitas kinerja yang dapat dilihat yaitu bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan kepadanya dan dalam menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan job deskripsi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kuantitas kinerja pemerintah Desa Lori dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan masih belum baik dikarenakan banyak pekerjaan yang harus ditunda disebabkan oleh pekerja yang harus bekerja di rumah yang membuat banyak pekerjaan yang tidak selesai. Kuantitas merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pegawai, serta tanggung jawab seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas dan berapa lama seorang pegawai menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk itu kuantitas seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas serta tanggung jawabnya dapat dilihat dari seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada laporan maupun pada pembangunan

c. Pemanfaatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang ditugaskan pada seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu. Ketepatan waktu merupakan bagian dari kinerja, karena kinerja dapat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Pembuatan pembangunan yang sesuai dan tepat waktu tentu akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik, sedangkan apabila pembangunan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dapat membuat kinerja pemerintah sedikit terhambat. Ketepatan waktu menurut Dharma (2013:355) yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu merupakan batasan pekerjaan yang harus segera diselesaikan sesuai dengan rancangan yang telah disusun untuk menyelesaikan pekerjaan. Pembuatan pembangunan yang sesuai dan tepat waktu tentu akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik, sedangkan apabila pembangunan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dapat membuat kinerja pemerintah sedikit terhambat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam ketepatan waktu dengan kinerja dalam pembangunan infrastruktur Desa Lori yang dimana dalam melakukan proses perencanaan serta pembangunan yang dikerjakan masih lah belum tepat sehingga masih ada nya pembangunan yang masih tidak selesai. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dalam menyelesaikan pembangunan jalan masih belum tepat waktu dikarenakan terjadinya pandemi yang membuat pemerintah desa harus menunda pembangunan yang telah direncanakan hal ini yang membuat pembangunan jalan desa terutama di jalan kampung dan perkampungan masih

didalam tahap pembangunan harus tertunda dan akan diselesaikan apabila keadaan sudah memungkinkan. dalam hal ini diharapkan pembangunan infrastruktur jalan dapat selesai untuk mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat desa.

Faktor Penghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil penelitian, selama observasi dan wawancara, penulis menemukan beberapa faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Faktor penghambat yang pertama dalam pembangunan desa serta kekurangan yang sangat sering terjadi pada Desa Lori yaitu pada bahan material yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan desa maupun pembangunan fisik lainnya, sangat sering mengalami keterlambatan hal ini juga dapat disebabkan oleh kondisi jalan menuju desa cukup susah yang juga dapat menyebabkan kendala dalam pengantaran barang sehingga dapat membuat perubahan pada perencanaan waktu penyelesaian. Dengan ada nya keterlambatan bahan material yang dibutuhkan membutuhkan waktu pengerjaan jalan desa menjadi lama dari waktu yang sudah ditentukan dalam penyelesaian pembangunan jalan desa. Faktor penghambat kedua adalah Pada masa pandemi yang terjadi yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kinerja pemerintah menjadi sedikit terhambat, dikarenakan para pegawai diharuskan menjaga jarak dan tidak sedikit para pegawai yang harus bekerja di rumah ataupun diberhentikan sehingga hal ini juga dapat membuat pembangunan jalan desa harus tertunda, dengan banyak pekerja yang diliburkan membuat pekerjaan semakin bertambah banyak untuk melancarkan kembali program pemerintah yang direncanakan serta dana pembangunan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk pandemi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang juga membuat pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa harus tertunda.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di lapangan mengenai kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser secara umum pembangunan sudah mulai dimajukan oleh pemerintah desa baik secara fisik maupun pembangunan secara non fisik. Pembangunan fisik seperti jalan desa yang secara bertahap pembangunan yang dilakukan untuk memajukan desa akan tetapi masih saja ada hambatan-hambatan yang terjadi membuat proses

pembangunan jalan desa menjadi terhambat. Berikut ini kesimpulan dari sub fokus penelitian:

- a. Dari segi kualitas, kinerja pemerintah desa di Desa Lori dalam kualitas pembangunan infrastruktur terutama jalan desa masih belum baik hal ini dikarenakan pekerjaan yang belum selesai pada saat masa pandemi serta dana pembangunan yang digunakan yang membuat banyak pembangunan yang harus ditunda.
 - b. Dari segi kuantitas, kinerja pemerintah desa di Desa Lori dalam kuantitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa masih belum baik dikarenakan banyak pekerja yang harus bekerja dirumah yang membuat pekerjaan masih banyak yang harus diundur ataupun ditunda, serta bahan material yang sering terhambat.
 - c. Dari segi ketepatan waktu, pemerintah desa di Desa Lori dalam ketepatan waktu pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan desa masih kurang tepat dari yang direncanakan dikarenakan kendala pandemi yang terjadi sehingga membuat pemerintah desa menghentikan sementara waktu pembangunan desa yang direncanakan.
2. Faktor penghambat kinerja dalam pembangunan infrastruktur Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser terutama pembangunan jalan desa yang sering terjadi yaitu terlambatnya bahan material yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa yang disebabkan kondisi jalan poros menuju desa masih belum dikatakan baik serta pembangunan harus tertunda dikarenakan pandemi yang terjadi membuat banyak pekerja yang harus diliburkan dan pengeluaran pembangunan jalan desa dialihkan ke pandemi yang membuat pembangunan jalan desa harus tertunda sampai keadaan memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan jalan desa.

Saran

Berdasarkan penelitian, wawancara dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pembangunan infrastruktur jalan desa terdapat permasalahan material pembangunan yang sering terhambat diharapkan agar pemerintah desa segera mengkoordinasikan dengan penjual sehingga pengiriman material pembangunan tidak terhambat.
2. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pembangunan infrastruktur jalan desa terdapat permasalahan tertundanya pembangunan jalan desa dikarenakan pandemi diharapkan pembangunan yang tertunda segera dilanjutkan pembangunan pada saat pandemi sudah meredah.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya dan Sumantri, Li. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Dharma, Surya. 2013. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Masram dan Mu'ah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.